

Forms Of Development Planning In India To Reduce Development Inequality

Bentuk Perencanaan Pembangunan Di India Untuk Mengurangi Ketimpangan Pembangunan

Mike Juni Elpisa ¹⁾, Elfindri ²⁾

^{1,2} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

Email: ¹ mike.juniorelpisa@gmail.com, ² elfindribana@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 November 2025]

Revised [31 December 2025]

Accepted [05 January 2026]

KEYWORDS

*Development Planning,
Regional Inequality,
Decentralization, India,
Regional Development.*

ABSTRAK

Ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan di India, mengingat tingginya keberagaman sosial, ekonomi, dan geografis yang dimiliki negara tersebut. Meskipun pertumbuhan ekonomi nasional menunjukkan tren positif, distribusi hasil pembangunan belum sepenuhnya merata antara wilayah maju dan wilayah tertinggal, khususnya antara kawasan perkotaan dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategi perencanaan pembangunan dalam upaya mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah di India. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis isi tematik terhadap berbagai dokumen kebijakan dan literatur ilmiah yang relevan. Data yang dianalisis merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi pemerintah India, seperti *Twelfth Five Year Plan* dan *Strategy for New India @75*, laporan kementerian terkait, serta publikasi akademik dan laporan lembaga internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan ketimpangan pembangunan di India dipengaruhi oleh kombinasi kebijakan perencanaan terpusat dan desentralisasi perencanaan. Perencanaan terpusat memberikan kerangka strategis nasional yang memastikan alokasi sumber daya lebih berorientasi pada pemerataan, sementara desentralisasi melalui sistem Panchayati Raj meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, program pembangunan wilayah tertinggal, pembangunan infrastruktur dasar, serta perluasan pelayanan sosial terbukti berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan menekan disparitas antarwilayah. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa perbedaan kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola antar daerah masih menjadi kendala dalam pencapaian pemerataan pembangunan. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan pengurangan ketimpangan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah secara berkelanjutan.

ABSTRACT

Regional development inequality remains a major challenge in India, given the country's high level of social, economic, and geographical diversity. Despite sustained national economic growth, the benefits of development have not been evenly distributed across regions, particularly between urban and rural areas. This study aims to analyze the role of development planning strategies in reducing regional development disparities in India. The research employs a descriptive qualitative approach using thematic content analysis of policy documents and relevant scholarly literature. The data analyzed are secondary data derived from official government documents, including the Twelfth Five Year Plan and Strategy for New India @75, sectoral ministry reports, academic publications, and reports from international institutions. The findings indicate that the reduction of regional development inequality in India is strongly influenced by an integrated combination of centralized planning and decentralized governance. Centralized planning provides a national strategic framework that prioritizes inclusive growth and equitable resource allocation, ensuring greater attention to underdeveloped regions. At the same time, decentralization through the Panchayati Raj system enhances policy effectiveness by aligning national objectives with local needs and improving community participation in development planning. Furthermore, targeted programs for backward regions, infrastructure development, and the expansion of social services have significantly contributed to improving rural livelihoods, reducing unemployment, and narrowing regional disparities. Infrastructure development, in particular, plays a critical role in enhancing connectivity, lowering transaction costs, and expanding access to economic opportunities. However, the study also finds that disparities persist due to variations in institutional capacity, governance quality, and administrative efficiency across regions. The study concludes that reducing regional development inequality requires not only well-designed planning policies but also effective implementation, strong local institutions, and sustained community engagement.

PENDAHULUAN

India merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar kedua di dunia yang memiliki keberagaman sosial, ekonomi, dan geografis yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut berdampak pada distribusi pembangunan yang tidak merata, dengan kota-kota besar seperti Mumbai, Bengaluru,

dan Delhi mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat sementara wilayah pedesaan serta beberapa negara bagian di bagian timur dan utara masih tertinggal secara signifikan. Ketimpangan pembangunan ini menjadi isu strategis karena berpengaruh terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan politik negara (Yadav, 2023). Ketimpangan pembangunan di India mencakup disparitas pendapatan, perbedaan akses pendidikan dan kesehatan, serta ketersediaan infrastruktur yang tidak merata antar wilayah (Chandrarekha & Guledagudda, 2025) Meskipun India telah mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa dekade terakhir, manfaat dari pertumbuhan ini tidak tersebar secara merata di seluruh negara (Yadav, 2023). Wilayah barat dan selatan cenderung memiliki indikator pembangunan yang lebih baik dibandingkan wilayah timur dan utara (Sheikh, 2022).

Berbagai upaya dilakukan pemerintah India mulai dari perencanaan lima tahunan tradisional hingga reformasi yang lebih fleksibel melalui NITI Aayog dan desentralisasi perencanaan pembangunan di tingkat negara bagian, distrik, dan desa—dengan tujuan utama mengurangi kesenjangan pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan yang merata. Namun, ketimpangan pembangunan tetap menjadi tantangan besar dan menjadi fokus kajian akademik karena implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai ketimpangan pembangunan di India telah banyak dilakukan dengan pendekatan dan fokus yang beragam. (Yadav, 2023) mengkaji ketimpangan pembangunan antarnegara bagian di India secara komprehensif. Hasil penelitiannya menunjukkan adanya disparitas yang signifikan antara negara bagian maju dan tertinggal, terutama dalam aspek makroekonomi dan ketersediaan infrastruktur, yang memperkuat ketidakseimbangan pembangunan regional. Selanjutnya, (Chandrarekha & Guledagudda, 2025) menyoroti perbedaan ketimpangan pendapatan dan tingkat kemiskinan antara wilayah pedesaan dan perkotaan di negara bagian Karnataka. Penelitian ini menemukan bahwa tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan cenderung lebih tinggi dibandingkan kawasan urban, sehingga memperlihatkan masih kuatnya kesenjangan pembangunan berbasis wilayah. (Pal, 2023) dalam studinya yang tersedia di *arXiv* mengevaluasi disparitas intra-industri dan inter-regional di sektor manufaktur India. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan efisiensi tenaga kerja dan modal antarwilayah turut memperparah ketimpangan pembangunan, terutama di daerah yang memiliki basis industri lemah. Sementara itu, (Sahasranaman dkk., 2024) meneliti hubungan antara urbanisasi dan dinamika distribusi pendapatan di India.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pertumbuhan dan konsentrasi urbanisasi di kota-kota besar berkontribusi pada meningkatnya disparitas indikator pembangunan antara wilayah perkotaan dan daerah hinterland. Penelitian lainnya oleh (Kulkarni dkk., 2023) mengkaji ketertinggalan pembangunan wilayah pedesaan melalui pendekatan multidimensi, dengan menganalisis indikator kemiskinan dan kapabilitas kehidupan masyarakat. Studi ini menegaskan bahwa ketimpangan pembangunan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, khususnya di wilayah pedesaan tertinggal.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai ketimpangan pembangunan di India dari perspektif pendapatan, perbedaan urban–rural, serta sektor industri, masih terdapat gap penelitian yang signifikan. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya bersifat deskriptif dan dilakukan pada skala negara bagian atau nasional secara agregat, sehingga belum secara spesifik mengevaluasi efektivitas kebijakan perencanaan pembangunan terbaru yang diinisiasi oleh NITI Aayog, khususnya dalam konteks implementasinya di tingkat distrik atau blok pembangunan. Selain itu, kajian empiris yang mengukur sejauh mana perencanaan pembangunan terdesentralisasi mampu meningkatkan kesejahteraan wilayah tertinggal masih relatif terbatas. Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) dengan melakukan analisis empiris terhadap implementasi kebijakan perencanaan pembangunan NITI Aayog pada level distrik atau blok pembangunan dengan memanfaatkan data primer dan sekunder terkini.

Penelitian ini juga mengusung evaluasi multidimensi ketimpangan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada indikator ekonomi, tetapi turut mencakup aspek sosial seperti pendidikan dan kesehatan, serta akses terhadap infrastruktur dasar. Selain itu, penelitian ini mengukur dampak desentralisasi perencanaan pembangunan terhadap upaya pengurangan ketimpangan regional, sehingga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam mendukung pemerataan pembangunan. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan empiris yang signifikan bagi pengembangan literatur pembangunan regional di India, khususnya dalam konteks reformasi sistem perencanaan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Ketimpangan Pembangunan di India

Ketimpangan pembangunan di India telah menjadi persoalan yang berlangsung sejak kemerdekaan. Ketimpangan tidak hanya terlihat dalam perbedaan pendapatan, namun juga mencakup akses layanan sosial, infrastruktur, serta kesempatan kerja. (Drèze & Sen, 2013) menjelaskan bahwa India menghadapi kontradiksi mendasar, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi di beberapa wilayah perkotaan tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan yang merata bagi seluruh penduduk. Kota-kota besar seperti Delhi, Mumbai, dan Bengaluru mengalami perkembangan pesat dengan sektor industri dan jasa yang modern, sedangkan wilayah pedesaan masih bergantung pada pertanian tradisional yang kurang produktif. Akibatnya, pendapatan per kapita di desa jauh tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan.

Ketimpangan ini diperburuk oleh fakta bahwa sebagian wilayah memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar. Banyak desa di India belum memiliki jaringan listrik, air bersih, layanan transportasi, dan fasilitas kesehatan yang memadai. Kondisi ini mempersempit peluang penduduk desa untuk meningkatkan kesejahteraan. Disparitas juga muncul antar negara bagian, di mana wilayah seperti Gujarat dan Maharashtra memiliki tingkat kesejahteraan tinggi, sedangkan Bihar, Uttar Pradesh, dan Odisha berada di tingkat bawah pada indikator pembangunan manusia. Oleh karena itu, penanganan ketimpangan menjadi isu strategis untuk menjaga stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Drèze & Sen, 2013).

Perencanaan Terpusat sebagai Strategi Nasional

Sejak awal kemerdekaan, India memilih sistem perencanaan terpusat untuk memberikan arah pembangunan nasional. Melalui sistem Rencana Lima Tahun, pemerintah menetapkan prioritas strategis yang mencakup pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi. Sistem ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh lembaga pemerintahan, sehingga alokasi anggaran dan kegiatan pembangunan dapat terkoordinasi (Commission, 2013). Perencanaan terpusat ini berperan penting dalam memobilisasi sumber daya negara untuk sektor-sektor yang dinilai krusial. Selama beberapa dekade, sistem ini memiliki dampak positif, tetapi karakteristiknya cenderung rigid dan kurang responsif terhadap dinamika lokal. Oleh karena itu, pada tahun 2014, pemerintah menghentikan sistem Rencana Lima Tahun dan membentuk NITI Aayog. Institusi baru ini memiliki pendekatan perencanaan yang lebih fleksibel dan berbasis bukti. Dokumen *Strategy for New India @75* menekankan pentingnya pertumbuhan inklusif dan pengurangan kesenjangan wilayah melalui peningkatan infrastruktur, reformasi ekonomi, serta kolaborasi antar pemerintahan (NITI Aayog, 2018). Pendekatan baru ini memungkinkan India untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal secara lebih cepat, sambil tetap menjaga keselarasan dengan tujuan pembangunan nasional jangka panjang.

Desentralisasi Perencanaan dan Partisipasi Lokal

Selain perencanaan terpusat, India mengembangkan sistem desentralisasi yang kuat untuk memastikan pembangunan lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat. Desentralisasi ini diwujudkan melalui sistem *Panchayati Raj*, yaitu struktur pemerintahan tiga tingkat di pedesaan yang terdiri dari desa, blok, dan distrik. Sistem ini memberikan kewenangan kepada pemerintah lokal untuk menyusun rencana pembangunan, merumuskan prioritas anggaran, dan mengelola pelaksanaan program (Kapila, 2000). (Sachs, 1996) menyatakan bahwa desentralisasi bertujuan untuk mendorong "ownership masyarakat" terhadap pembangunan, sehingga keputusan kebijakan tidak hanya bersifat top-down dari pemerintah pusat, tetapi juga bottom-up dari masyarakat. Masyarakat terlibat dalam forum musyawarah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan seperti pembangunan jalan, irigasi, sekolah, pos kesehatan, serta fasilitas air bersih. Sistem ini juga diharapkan meningkatkan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penggunaan anggaran (Mathur, 2011). Walaupun desentralisasi membawa banyak manfaat, tantangan tetap muncul, terutama di daerah dengan kapasitas kelembagaan lemah. Beberapa daerah mengalami keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta masih menghadapi isu korupsi. Namun, secara umum desentralisasi berhasil membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pembangunan (Sisodia, 2011).

Program Pembangunan Wilayah Tertinggal

Untuk menangani ketimpangan antar wilayah, pemerintah India menerapkan program khusus bagi daerah tertinggal. Salah satu program utama adalah *Backward Regions Grant Fund (BRGF)* yang bertujuan memperbaiki kondisi sosial dan ekonomi daerah miskin melalui penyediaan infrastruktur dasar.

Program ini menyediakan dana untuk pembangunan jalan desa, sekolah, saluran irigasi, fasilitas kesehatan, dan sarana air bersih. Laporan Kementerian Pembangunan Pedesaan mencatat bahwa dukungan ini meningkatkan konektivitas sosial dan ekonomi serta memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan publik (Government of India, 2015).

Selain BRGF, program *National Rural Employment Guarantee Act (NREGA)* memberikan jaminan kesempatan kerja bagi rumah tangga miskin di pedesaan. Setiap rumah tangga dijamin mendapatkan minimal 100 hari kerja dalam satu tahun. Program ini memberikan pendapatan tambahan, mengurangi pengangguran musiman, dan mencegah migrasi tenaga kerja dari desa ke kota. Dengan demikian, program-program tersebut menjadi instrumen kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Infrastruktur sebagai Pendorong Pemerataan. Pembangunan infrastruktur merupakan faktor kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Pemerintah India menyadari bahwa tanpa infrastruktur yang memadai, wilayah pedesaan akan tetap tertinggal. Oleh karena itu, program *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana* difokuskan pada pembangunan jalan desa agar desa-desa dapat terhubung ke kota terdekat, pasar, sekolah, dan rumah sakit (Balamurugan, 2020). (Chatterjee dkk., 2016) menegaskan bahwa infrastruktur jalan, listrik, sanitasi, dan air bersih memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas hidup. Petani dapat menjual hasil panen dengan biaya transportasi yang lebih rendah, anak-anak dapat bersekolah dengan akses yang lebih mudah, dan layanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat lebih cepat. Pembangunan infrastruktur juga membuka peluang investasi dan dapat menciptakan pusat pertumbuhan baru di daerah pedesaan sehingga tekanan pembangunan tidak hanya terpusat di kota besar.

Pelayanan Sosial, Pendidikan, dan Kesejahteraan

Selain pembangunan fisik, India menempatkan pelayanan sosial sebagai prioritas pembangunan. Pemerintah menerapkan *Right to Education Act (RTE)* untuk menjamin pendidikan dasar wajib dan gratis bagi anak usia 6–14 tahun. Kebijakan ini meningkatkan angka partisipasi sekolah di wilayah pedesaan dan membantu mengurangi kesenjangan literasi (Minocha, 2006). Di sektor kesehatan, pemerintah memperluas layanan kesehatan melalui pembangunan pusat kesehatan desa, imunisasi, layanan kesehatan ibu dan anak, serta subsidi obat-obatan. Selain itu, pemerintah memberikan bantuan sosial seperti bantuan pangan untuk keluarga miskin, tunjangan bagi lansia, dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Langkah ini memastikan kelompok rentan tidak terpinggirkan dalam proses pembangunan (Drèze & Sen, 2013).

Dampak Implementasi Perencanaan terhadap Pengurangan Ketimpangan

Implementasi perencanaan pembangunan di India menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi ketimpangan. (Chatterjee dkk., 2016) melaporkan bahwa angka kemiskinan menurun, akses terhadap infrastruktur meningkat, dan kesempatan ekonomi diperluas di wilayah pedesaan. Program jaminan kerja NREGA berhasil mengurangi migrasi desa-kota dan memberikan pendapatan yang stabil kepada rumah tangga miskin. Desentralisasi perencanaan melalui Panchayati Raj juga meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam merumuskan kebutuhan pembangunan (Sharma, 2022). Keputusan pembangunan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan daerah, sehingga alokasi anggaran menjadi lebih efektif. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam bentuk perbedaan kapasitas kelembagaan antar daerah, isu korupsi, serta keterbatasan anggaran (Sahoo dkk., 2020). Meskipun demikian, secara keseluruhan pengalaman India menunjukkan bahwa perencanaan yang terintegrasi dan berbasis kebutuhan lokal dapat menekan ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian tidak berfokus pada pengujian hubungan kuantitatif antarvariabel, melainkan pada upaya menggambarkan dan memahami secara mendalam proses perencanaan pembangunan yang diterapkan di India. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya menafsirkan kebijakan pembangunan berdasarkan analisis dokumen, laporan resmi pemerintah, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena perencanaan pembangunan secara holistik dan menangkap dinamika kebijakan dalam konteks sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang kompleks. Penelitian ini bersifat eksploratif karena bertujuan mengidentifikasi pola, strategi, serta mekanisme kebijakan perencanaan pembangunan yang berkontribusi terhadap pengurangan

ketimpangan pembangunan antarwilayah. Fokus utama penelitian terletak pada bagaimana kebijakan dirancang, diimplementasikan, dan berdampak pada pemerataan pembangunan, sehingga metode kualitatif deskriptif dinilai paling relevan untuk mencapai tujuan penelitian.

Lokasi penelitian ini bersifat dokumen dan konseptual, dengan konteks geografis yang jelas, yaitu negara India. Penelitian tidak melibatkan pengumpulan data lapangan secara langsung di wilayah tertentu, melainkan menganalisis berbagai dokumen yang merepresentasikan kebijakan dan kondisi pembangunan di India pada tingkat nasional hingga lokal. Fokus analisis diarahkan pada kebijakan perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh lembaga perencanaan pusat, seperti Planning Commission dan NITI Aayog, serta keterkaitannya dengan implementasi di tingkat negara bagian, distrik, dan desa melalui mekanisme pemerintahan daerah dan sistem Panchayati Raj. Dengan demikian, lokasi penelitian dipahami sebagai ruang analisis kebijakan yang berskala nasional, namun tetap mempertimbangkan praktik implementasi pada berbagai level pemerintahan.

Variabel dalam penelitian ini bersifat konseptual dan ditentukan berdasarkan kajian literatur serta analisis isi dokumen kebijakan. Variabel pertama adalah perencanaan terpusat, yang merujuk pada kebijakan pembangunan yang disusun oleh pemerintah pusat, seperti Rencana Lima Tahun dan dokumen *Strategy for New India @75*. Variabel kedua adalah desentralisasi perencanaan, yang mencerminkan keterlibatan pemerintah negara bagian, distrik, dan desa dalam merumuskan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan lokal melalui sistem Panchayati Raj. Variabel ketiga mencakup program pembangunan wilayah tertinggal, termasuk program dukungan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja, seperti Backward Regions Grant Fund dan National Rural Employment Guarantee Act (NREGA). Variabel keempat adalah pembangunan infrastruktur, yang meliputi penyediaan jalan, listrik, air bersih, sanitasi, dan telekomunikasi sebagai prasyarat peningkatan akses ekonomi dan sosial. Variabel kelima adalah pelayanan sosial, yang mencakup kebijakan perluasan akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan bantuan kesejahteraan. Variabel terakhir adalah ketimpangan pembangunan, yang dipahami sebagai perbedaan akses terhadap peluang ekonomi, pendapatan, dan kualitas hidup antarwilayah, khususnya antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Subjek penelitian ini adalah dokumen dan sumber tertulis yang memiliki relevansi langsung dengan topik penelitian dan dianggap kredibel. Subjek utama berupa dokumen kebijakan pemerintah India, seperti *Twelfth Five Year Plan*, *Strategy for New India @75*, serta laporan tahunan Kementerian Pembangunan Pedesaan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur akademik yang membahas ketimpangan pembangunan, reformasi ekonomi, dan sistem perencanaan nasional di India yang ditulis oleh para akademisi dan pakar pembangunan, seperti Dreze, Sen, dan Ahluwalia. Laporan dari lembaga internasional, seperti World Bank, turut digunakan sebagai subjek penelitian karena menyediakan analisis berbasis data mengenai kemiskinan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan. Seluruh subjek penelitian dipilih secara purposif karena memiliki relevansi substantif dan memberikan informasi yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Penggunaan data sekunder dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kebijakan dan dokumen yang telah dipublikasikan. Jenis data meliputi dokumen kebijakan, laporan tahunan pemerintah, data statistik pembangunan, publikasi ilmiah, serta laporan kajian dari lembaga internasional. Sumber data diperoleh dari dokumen resmi pemerintah India, seperti Rencana Lima Tahun dan dokumen strategis yang diterbitkan oleh NITI Aayog. Selain itu, laporan program kementerian terkait pembangunan pedesaan digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program pembangunan wilayah tertinggal. Data juga bersumber dari publikasi ilmiah dan laporan World Bank yang memberikan analisis empiris mengenai kemiskinan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan. Seluruh sumber data dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas, relevansi, dan keakuratan informasi.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi tematik. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari dokumen yang dianalisis. Proses analisis dimulai dengan tahap reduksi data, yaitu membaca seluruh dokumen secara mendalam dan menyeleksi informasi yang relevan dengan perencanaan pembangunan, desentralisasi, program wilayah tertinggal, pembangunan infrastruktur, pelayanan sosial, serta dampaknya terhadap ketimpangan pembangunan. Data yang telah direduksi kemudian dikategorikan ke dalam tema-tema tertentu agar pola dan hubungan antar konsep dapat dianalisis secara sistematis. Tahap selanjutnya adalah interpretasi, di mana peneliti menafsirkan makna dari setiap tema dan menjelaskan keterkaitannya dengan upaya pengurangan ketimpangan pembangunan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan konsistensi temuan dari berbagai sumber, sehingga hasil penelitian memiliki validitas dan landasan ilmiah yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi perencanaan pembangunan di India memiliki keterkaitan langsung dengan upaya penurunan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Temuan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam lima aspek utama, yaitu perencanaan terpusat, desentralisasi perencanaan, program pembangunan wilayah tertinggal, pembangunan infrastruktur, serta perluasan pelayanan sosial. Pertama, perencanaan terpusat melalui dokumen strategis jangka menengah dan panjang berperan sebagai kerangka nasional dalam mengarahkan pembangunan. Dokumen seperti *Twelfth Five Year Plan* dan *Strategy for New India @75* menetapkan tujuan pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi inklusif, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan infrastruktur. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan ini membantu menyelaraskan prioritas lintas sektor dan lintas wilayah, sehingga daerah tertinggal memperoleh perhatian lebih besar dalam perencanaan program dan alokasi anggaran.

Hal ini sejalan dengan temuan (Ahluwalia, 2019) yang menyatakan bahwa perencanaan nasional di India tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan antarwilayah bagian. Kedua, desentralisasi perencanaan muncul sebagai elemen kunci dalam menjembatani kebijakan nasional dengan kebutuhan lokal. Sistem pemerintahan Panchayati Raj memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan di tingkat desa, blok, dan distrik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan meningkatkan ketepatan identifikasi masalah dan prioritas pembangunan. Daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola yang lebih baik cenderung menunjukkan capaian pembangunan yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan kapasitas kelembagaan yang lemah. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Drèze & Sen, 2013) yang menegaskan bahwa partisipasi lokal memperkuat efektivitas kebijakan pembangunan di India. Ketiga, program pembangunan wilayah tertinggal memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Program seperti *Backward Regions Grant Fund* (BRGF) memperkuat penyediaan infrastruktur dasar di wilayah miskin, sementara *National Rural Employment Guarantee Act* (NREGA) menyediakan jaminan kesempatan kerja minimal seratus hari per tahun bagi rumah tangga pedesaan. Temuan menunjukkan bahwa program-program tersebut berkontribusi dalam menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan rumah tangga, serta menekan laju migrasi dari desa ke kota. Hasil ini konsisten dengan temuan (Narayan, 2022) yang menunjukkan bahwa NREGA memiliki efek signifikan terhadap stabilitas pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga pedesaan.

Keempat, pembangunan infrastruktur menjadi faktor dominan dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah. Program *Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana* (PMGSY) terbukti meningkatkan konektivitas wilayah pedesaan dengan pusat-pusat ekonomi, fasilitas kesehatan, dan institusi pendidikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembangunan jalan, listrik, sanitasi, dan akses air bersih mempercepat aktivitas ekonomi, meningkatkan mobilitas tenaga kerja, serta menurunkan biaya logistik masyarakat pedesaan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Calderón & Servén, 2010) yang menegaskan bahwa infrastruktur memiliki peran krusial dalam mengurangi disparitas pembangunan regional di negara berkembang. Kelima, pelayanan sosial dan perlindungan kesejahteraan berperan penting dalam mencegah kelompok rentan tertinggal dalam proses pembangunan. Implementasi *Right to Education Act* serta penguatan layanan kesehatan dasar di pedesaan meningkatkan kualitas modal manusia. Temuan menunjukkan bahwa akses pendidikan dan kesehatan yang lebih merata berkontribusi pada penurunan ketimpangan pembangunan dalam jangka panjang. Hal ini sejalan dengan temuan (Sen's, 2020) yang menekankan bahwa pembangunan manusia merupakan fondasi utama bagi pembangunan yang berkeadilan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah memberikan kontribusi nyata dalam menekan ketimpangan pembangunan di India. Meskipun demikian, ketimpangan antarwilayah belum sepenuhnya teratasi akibat perbedaan kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, dan tingkat korupsi di berbagai daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi perencanaan pembangunan di India berperan signifikan dalam menekan ketimpangan pembangunan antarwilayah melalui kombinasi kebijakan yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Perencanaan terpusat memberikan kerangka strategis nasional yang mampu menyelaraskan prioritas pembangunan lintas sektor dan wilayah, sehingga daerah tertinggal memperoleh perhatian lebih besar dalam perumusan program dan alokasi anggaran. Kebijakan

ini memastikan bahwa pembangunan tidak semata-mata mengikuti mekanisme pasar, tetapi juga berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial. Desentralisasi perencanaan melalui sistem Panchayati Raj terbukti memperkuat efektivitas kebijakan nasional dengan menyesuaikannya pada kebutuhan lokal. Partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan di tingkat desa, blok, dan distrik meningkatkan ketepatan sasaran program serta efisiensi penggunaan sumber daya. Namun demikian, efektivitas desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan kualitas tata kelola pemerintah daerah, yang masih menunjukkan variasi antarwilayah.

Program pembangunan wilayah tertinggal, seperti Backward Regions Grant Fund dan National Rural Employment Guarantee Act, memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengurangan migrasi desa–kota. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar, terutama konektivitas jalan, listrik, air bersih, dan sanitasi, menjadi faktor pengungkit utama dalam mengurangi disparitas antarwilayah dengan memperluas akses ekonomi dan sosial masyarakat pedesaan.

Pelayanan sosial di bidang pendidikan dan kesehatan berperan sebagai fondasi pembangunan jangka panjang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Akses yang lebih merata terhadap layanan dasar ini memungkinkan masyarakat wilayah tertinggal untuk memanfaatkan peluang ekonomi secara lebih optimal, sehingga berkontribusi pada penurunan ketimpangan struktural. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa ketimpangan pembangunan di India belum sepenuhnya teratasi akibat perbedaan kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola, serta masalah korupsi dan inefisiensi anggaran di beberapa daerah. Oleh karena itu, keberhasilan pengurangan ketimpangan tidak hanya bergantung pada desain kebijakan perencanaan pembangunan, tetapi juga pada kualitas implementasi, integritas birokrasi, serta penguatan kapasitas pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, pemerintah India perlu terus memperkuat integrasi antara perencanaan pembangunan terpusat dan desentralisasi perencanaan agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara lebih efektif di tingkat lokal. Penyelarasan ini perlu disertai dengan mekanisme koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan yang lebih kuat untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan fokus pada wilayah tertinggal. Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, khususnya di tingkat distrik dan desa, menjadi kebutuhan mendesak. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, sistem administrasi, serta tata kelola keuangan daerah diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan dan meminimalkan ketimpangan hasil antarwilayah. Ketiga, program pembangunan wilayah tertinggal dan jaminan kerja pedesaan perlu terus dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi lokal agar dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Evaluasi berbasis kinerja dan partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa program benar-benar menjawab kebutuhan kelompok rentan. Keempat, pemerintah disarankan untuk meningkatkan investasi pada pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan sosial, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah tertinggal. Akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur akan memperkuat kualitas sumber daya manusia dan mempercepat pengurangan ketimpangan pembangunan jangka panjang. Terakhir, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris kuantitatif atau metode campuran dengan unit analisis yang lebih spesifik, seperti tingkat distrik atau desa, guna mengukur secara lebih akurat dampak kebijakan perencanaan pembangunan terhadap pengurangan ketimpangan antarwilayah. Hal ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris dan mendukung perumusan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahluwalia, M. S. (2019). India's Economic Reforms: Achievements and Next Steps. *Asian Economic Policy Review*, 14(1), 46–62. <https://doi.org/10.1111/aep.12239>
- Balamurugan, J. (2020). Role of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) in Rural Development. *Journal of Social Welfare and Management*, 12(2), 77–82.
- Calderón, C., & Servén, L. (2010). Infrastructure and economic development in Sub-Saharan Africa. *Journal of African Economies*, 19(suppl_1), i13–i87.
- Chandrarekha, & Guledagudda, S. S. (2025). Poverty Trends and Regional Disparities in India: A Primary Emphasis on Karnataka. *Journal of Scientific Research and Reports*, 31(7), 247–262. <https://doi.org/10.9734/jsrr/2025/v31i73244>

- Chatterjee, U., Murgai, R., Narayan, A., & Rama, M. (2016). Pathways to reducing poverty and sharing prosperity in India: Lessons from the last two decades. *World Bank Working Paper, 106902*.
- Commission, I. P. (2013). *Twelfth Five Year Plan (2012-2017): Three Volume Set* (Vol. 1). SAGE Publications Pvt. Limited.
- Drèze, J., & Sen, A. (2013). *An Uncertain Glory: India and its Contradictions*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.23943/9781400848775>
- Government of India. (2015). *Annual Report 2014-15*.
- Kapila, E. : R. K. & U. (2000). *Economic Developments In India: Monthly Update, Volume -22 Analysis, Reports, Policy Documents*. Academic Foundation.
- Kulkarni, A., Das, R., Srivastava, R. S., & Chakraborty, T. (2023). *Learning and Reasoning Multifaceted and Longitudinal Data for Poverty Estimates and Livelihood Capabilities of Lagged Regions in Rural India* (No. arXiv:2304.13958). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.13958>
- Mathur, A. (2011). A Winning Strategy for India's North-East. *Jindal Journal of International Affairs, 1*(1), 269–298. <https://doi.org/10.54945/jjia.v1i1.21>
- Minocha, O. P. (2006). Capacity Building for Development: An Assessment of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. *Indian Journal of Public Administration, 52*(3), 358–369. <https://doi.org/10.1177/0019556120060306>
- Narayan, S. (2022). Fifteen Years of India's NREGA: Employer of the Last Resort? *The Indian Journal of Labour Economics, 65*(3), 779–799. <https://doi.org/10.1007/s41027-022-00396-4>
- NITI Aayog. (2018). *Strategy for New India @75*. Government of India.
- Pal, S. (2023). *A Comparative Study of Inter-Regional Intra-Industry Disparity* (No. arXiv:2304.02430). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.02430>
- Sachs, J. (1996). India's Unfinished Reform Agenda. *Indian Journal of Public Administration, 42*(3), 546–557. <https://doi.org/10.1177/0019556119960334>
- Sahasranaman, A., Kumar, N., & Bettencourt, L. M. A. (2024). *Urbanization, economic development, and income distribution dynamics in India* (No. arXiv:2410.04737). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.04737>
- Sahoo, D. S., Madapana, M. K., Murty, M. P. N., & Rao, T. D. (2020). *Watching the Grass Grow: An empirical study on the effectiveness of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana (PMGSY) in the KBK Districts of Odisha, India*.
- Sen's, A. (2020). *Sen's Development as Freedom and Sachs's The End of Poverty: A Comparative Study* [PhD Thesis, Ateneo de Davao University]. https://www.academia.edu/download/63066088/Sens_Development_as_Freedom_and_Sachss_The_End_of_Poverty20200423-42272-aigq3x.pdf
- Sharma, H. L. (2022). *Strengthening Rural Economy*. Kurukshetra. https://www.researchgate.net/profile/HI-Sharma/publication/366919562_Strengthening_Rural_Economy_Budget_2022-23/links/63b851c7097c7832ca968f53/Strengthening-Rural-Economy-Budget-2022-23.pdf
- Sheikh, T. A. (2022). Regional Disparities in Contemporary India: Concerns and Policies for Development. *International Journal of Research, 9*(5), 107–116.
- Sisodia, N. S. (2011). The Unfinished Agenda. *Strategic Analysis, 35*(4), 698–704. <https://doi.org/10.1080/09700161.2011.576109>
- Yadav, S. (2023). The Problem of Regional Disparities: An Overview in Indian Context. *International Journal of Humanities and Education Development (IJHED), 5*(2), 14–16. <https://doi.org/10.22161/jhed.5.2.3>